

## Manajemen Pembiayaan: Pentingnya Manajemen dan Akuntabilitas Pembiayaan pada PAUD

Suhardi<sup>1</sup>, Ari Sri Mulyani<sup>2</sup>, Fenny Anggraini<sup>3</sup>, Ananda Khairunnisa<sup>4</sup>,  
Alivia Lulu Amantsuro<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri  
Syarif Hidayatullah Jakarta

e-mail: [hardinaam@gmail.com](mailto:hardinaam@gmail.com)<sup>1</sup>, [arisrimulyani2004@gmail.com](mailto:arisrimulyani2004@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[fenyanggraini00@gmail.com](mailto:fenyanggraini00@gmail.com)<sup>3</sup>, [anandanisa.kampus22@gmail.com](mailto:anandanisa.kampus22@gmail.com)<sup>4</sup>  
[alivialuluamantsuro@gmail.com](mailto:alivialuluamantsuro@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang pentingnya manajemen dan akuntabilitas pembiayaan pada PAUD. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research), dan data yang dikumpulkan berasal dari data atau karya tulis ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. Manajemen pembiayaan yang efektif dan akuntabilitas yang kuat adalah dua faktor utama yang mendukung keberlanjutan dan kualitas layanan PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya manajemen pembiayaan dan akuntabilitas dalam konteks institusi PAUD. Selain itu, akuntabilitas yang kuat diperlukan untuk memastikan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana publik atau swasta yang diterima oleh institusi PAUD. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan dengan para donor dan masyarakat, tetapi juga mengarah pada pengelolaan yang lebih efisien dan efektif. Studi ini mengkaji berbagai praktik manajemen pembiayaan dan strategi akuntabilitas yang dapat diterapkan dalam konteks PAUD, serta dampaknya terhadap kualitas layanan dan keberlanjutan institusi. Hasilnya menunjukkan bahwa dengan menerapkan praktik-praktik ini secara konsisten, institusi PAUD dapat meningkatkan aksesibilitas, kualitas pembelajaran, dan dukungan bagi perkembangan holistik anak usia dini.

**Kata kunci:** *Manajemen Pembiayaan, Akuntabilitas, Pendidikan Anak Usia Dini*

### Abstract

This study discusses the importance of management and accountability of funding in the context of early childhood education (PAUD). PAUD plays a crucial role in shaping the foundation for child development, but is often faced with rather complex financing challenges. Effective funding management is required to ensure adequate resources and transparent use. The study uses a library research approach to explore key concepts in PAUD financing management. The findings show that good management practices include careful budget planning, proper fund allocation, and regular evaluation and reporting. Accountability in fund management is needed to build the trust of stakeholders, such as governments, donors, and the public. The results of this study provide insight into how PAUD institutions can improve the efficiency of fund use, address financial challenges, and improve accessibility of quality education for early childhood. Implications of this research are the need for supportive policies, managerial training for managers, as well as a strong monitoring system to ensure transparency and accountability in the management of PAUD funding.

**Keywords :** *Financing management, Accountability, Early childhood education*

## PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan unit pendidikan yang terdapat dalam jalur pendidikan formal. Di dalamnya, pendidikan diberikan kepada anak-anak usia 0-6 tahun. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah merangsang perkembangan anak secara menyeluruh, baik dari segi fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, kerjasama antara pendidik dan orang tua sangat penting agar perkembangan anak dapat optimal (Wahyuni, 2023).

Pada dunia pendidikan ada hal yang sangat diperhatikan salah satunya yaitu manajemen pembiayaan atau pengaturan keuangan pada lembaga pendidikan. Manajemen keuangan di lembaga pendidikan melibatkan aktifitas sekolah untuk memperoleh dana dan mengelola dana dengan sebaik-baiknya. Terutama pada lembaga pendidikan anak usia dini pengelolaan keuangan terkait dengan program tahunan, administrasi keuangan sekolah, serta pengawasan dan pemeriksaan keuangan.

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang terstruktur dan terkelola dalam segala hal. Pada proses manajemen pendidikan melibatkan pengaturan sarana dan prasarana, pembiayaan, ekstrakurikuler maupun pembelajaran. Hal terpenting di dalam sekolah yaitu manajemen keuangan. Banyak yang berpikir bahwa membahas mengenai uang merupakan pembicaraan yang sensitif, sehingga dalam hal apapun yang berhubungan dengan uang haruslah jelas informasinya. Manajemen keuangan memiliki manfaat untuk mengetahui berapa banyak uang yang masuk dan yang dikeluarkan, serta lebih terstruktur. Jika manajemen keuangan tidak berfungsi dengan baik atau dianggap enteng, dengan pencatatan yang kurang teratur, maka hal ini akan mempengaruhi lembaga pendidikan tersebut (Maria Ulfah, 2019).

Semua jenjang pada lembaga pendidikan mulai dari prasekolah, sekolah sampai perguruan tinggi merupakan organisasi yang di dalam operasionalnya memerlukan dan membutuhkan uang (*money*) untuk menggerakkan semua sumber daya (*resource*) yang ada. Dengan demikian perlu diatur dengan efektif dan efisien untuk membantu pencapaian tujuan pendidikan (Salamun, Suyono., 2013). Pendidikan memiliki dampak signifikan dalam pembangunan suatu negara, karena dianggap oleh masyarakat sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai generasi penerus bangsa dan calon pemimpin masa depan. Proses pembangunan SDM tidak bisa dicapai secara instan, melainkan memerlukan waktu yang panjang dan konsisten. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis adalah memulainya

sejak dini, khususnya pada masa anak usia dini yang merupakan periode keemasan di mana pertumbuhan dan perkembangan berlangsung pesat dan kritis untuk mendukung kesuksesan di masa depan. Dalam konteks ini, untuk menciptakan generasi yang berkualitas, diperlukan dukungan dari lembaga pendidikan. Kualitas lembaga pendidikan sangat terkait dengan investasi yang dilakukan dalam proses pendidikan di sekolah atau madrasah. Sebagaimana disampaikan oleh Junaidi Achmad, hubungan biaya dengan hasil pendidikan dikemukakan oleh John, Edgar, dan Kern. Mereka menunjukkan bahwa biaya pendidikan secara langsung mempengaruhi kualitas dan jumlah output pendidikan. Dalam konteks sistem sekolah, peningkatan jumlah siswa sebesar 10% akan meningkatkan biaya hampir secara proporsional, dan hal ini berdampak pada kualitas pendidikan. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa tidak selalu ada hubungan yang langsung antara biaya dan kualitas pendidikan (Diding dan Imam, 2016: 193).

Dengan demikian, biaya menjadi faktor krusial dalam kelancaran proses pendidikan. Dana yang tersedia untuk sarana dan prasarana, administrasi, serta kebutuhan kesejahteraan pendidik seperti gaji, sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas dan efektivitas pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan adalah salah satu elemen input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Peran biaya pendidikan sangat menentukan dan tidak dapat diabaikan dalam upaya pendidikan. Tanpa biaya tersebut, proses pendidikan di sekolah tidak dapat berjalan. Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai total pengeluaran yang harus ditanggung oleh siswa sebelum mereka

dapat mengikuti proses pendidikan. Secara konseptual, besarnya biaya yang dikeluarkan dan kemampuan untuk menyediakan anggaran merupakan indikator kelayakan sebuah institusi pendidikan. Institusi pendidikan harus dapat menjamin bahwa setiap kegiatan yang direncanakan didukung oleh sumber daya keuangan yang memadai (Nazarudin, Setyaningsih, and Ardelya Kesumah 2020).

Indonesia adalah negara yang sah dengan standar pendidikan nasional yang menjadi panduan dalam pembentukan lembaga pendidikan berkualitas. Salah satu aspek kritisnya adalah standar pendanaan. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengelolaan dan pembiayaan pendidikan harus didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini harus dipatuhi oleh setiap lembaga untuk memastikan pengelolaan dana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan dan tak terpisahkan dari manajemen pendidikan (Sunan et al. 2022).

Manajemen pendidikan diharapkan mampu menciptakan sekolah berkualitas di tengah perubahan paradigma pendidikan saat ini. Terutama dalam konteks biaya pendidikan, semua pihak mengakui bahwa biaya pendidikan semakin meningkat. Adalah wajar jika keuangan yang transparan dan akuntabel (Mahmudah and Yoenanto 2023).

Akuntabilitas harus diterapkan dalam semua aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan pendidikan, karena biaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam keseluruhan proses pendidikan. Penerapan akuntabilitas yang baik dalam pembiayaan pendidikan akan berkontribusi pada hasil pendidikan yang berkualitas. Kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan adalah kemampuan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola dana yang tersedia dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok serta skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan, sesuai dengan perencanaan program. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menciptakan kondisi yang demokratis dan adil dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah "pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif," yang menghormati hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, dan keragaman bangsa. Diskriminatif dalam konteks pembiayaan pendidikan berarti bahwa pembiayaan harus adil bagi setiap warga negara yang ingin mengakses pendidikan untuk mengembangkan potensinya (Salamun, Suyono. 2013).

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian library research yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. library research juga menjadi langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian guna memperoleh penelitian sejenis, memperdalam kajian teori atau mempertajam metodologi (Mustika, 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Manajemen Pembiayaan**

Istilah manajemen berasal dari kata 'manage' yang memiliki arti mengurus, tetapi ada juga yang menggunakan istilah tata laksana. Jadi pada pokoknya pengertian Manajemen adalah mengurus, mengatur, membina, memimpin supaya tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau lembaga. Keberlanjutan proses manajemen dalam lembaga pendidikan sangat tergantung pada kekuatan atau kelemahan pada pembiayaan tersebut. Istilah pembiayaan berasal dari "biaya," yang merujuk pada uang yang dikeluarkan untuk mengadakan, mendirikan, atau melakukan sesuatu, konsep pembiayaan mencakup semua aspek yang berhubungan dengan biaya. Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan pada mekanisme penganggaran. Penentuan biaya memiliki dampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi (Salamun, Suyono., 2013). Maka dapat disimpulkan manajemen pembiayaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengendalian sumber daya yang dilakukan oleh suatu badan yang menjalankan kegiatan usahanya.

### **Tujuan dan Fungsi Manajemen Pembiayaan**

Tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang dari sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan sekolah. Hal ini bertujuan agar dana dapat digunakan secara efektif sesuai aturan dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Peran kepala sekolah sangat penting untuk mengelola keuangan dengan sebaik mungkin dengan memperdayakan sumber daya manusia yang ada. Melalui manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan pada kegiatan sekolah dapat direncanakan, pengadaannya diupayakan, pencatatan secara transparan, dan dana digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Maka tujuan manajemen keuangan yaitu:

- 1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana sekolah
- 2) meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di sekolah
- 3) mengurangi pada penyalahgunaan dana sekolah (Salamun, Suyono., 2013).

Manajemen pembiayaan pada PAUD pada dasarnya melibatkan pengaturan keuangan secara efektif dan efisien untuk menyelenggarakan kelangsungan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran pada lembaga PAUD dapat tercapai

Tujuan manajemen pembiayaan pada lembaga PAUD merupakan salah satu aktivitas yang penting dilakukan dengan empat tujuan utama yaitu:

1. Memastikan pembiayaan yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk kegiatan harian PAUD dan memanfaatkan kelebihan dana untuk menginvestasikan kembali.
2. Memelihara barang-barang yang sudah ada atau aset pada lembaga PAUD.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada penggunaan pembiayaan PAUD.
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan di PAUD sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan pembiayaan PAUD.

Fungsi manajemen keuangan pada lembaga pendidikan yaitu untuk menjalankan kegiatan agar tujuan yang diinginkan tercapai dengan efektif dan efisien (Salamun, Suyono., 2013). Manajemen pembiayaan memiliki peran yang sangat penting untuk ada di dalam penyelenggaraan pendidikan seperti PAUD, hal ini memiliki fungsi agar sistem keuangan pada lembaga pendidikan seperti PAUD lebih terstruktur dan terdata yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena ini, maka fungsi manajemen pembiayaan mencakup:

- 1) pengawasan atas biaya
- 2) penetapan kebijakan harga
- 3) peramalan pada laba yang akan datang
- 4) evaluasi biaya modal kerja.

### **RUANG LINGKUP MANAJEMEN PEMBIAYAAN**

Manajemen setidaknya mempunyai tiga ruang lingkup, yaitu perencanaan keuangan (budgeting), pelaksanaan (akunting), dan tahap penilaian atau evaluasi (auditing), Sebagai berikut :

1. Perencanaan Keuangan (Budgeting)  
Budgeting adalah proses menyusun anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang diungkapkan dalam bentuk nilai uang secara kuantitatif untuk

penggunaan tertentu. Berikut ini adalah panduan untuk melaksanakan kegiatan dalam waktu tertentu. Dalam menentukan biaya satuan pendidikan, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan: pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro menghitung biaya berdasarkan total pengeluaran pendidikan dari berbagai sumber dana, yang kemudian dibagi dengan jumlah murid. Sementara itu, pendekatan mikro menghitung biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid (Bakar Abu,Dkk 2015) Menurut Mulyana terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi dalam penganggaran biaya pendidikan:

- A) Anggaran belanja harus dapat menggantikan peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan kebutuhan pendidikan.
  - B) Pengembangan sistem perencanaan yang efektif.
  - C) Pemantauan dan evaluasi lulusan pendidikan secara berkelanjutan untuk digunakan dalam perencanaan berikutnya (Jahari,Dkk 2013).
2. Pelaksanaan (Akunting)  
Akunting merujuk pada proses pencatatan hasil kegiatan ekonomi. Pelaksanaan keuangan sekolah dari berbagai sumber dana dapat dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Kedua kegiatan ini harus didokumentasikan sesuai dengan prosedur pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama (Machali, Dkk 2018).
  3. Tahap Penilaian atau Evaluasi (Auditing)  
Auditing adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti terkait informasi yang dapat diukur tentang suatu entitas ekonomi. Proses ini dilakukan oleh individu yang kompeten dan independen dengan tujuan untuk menyampaikan laporan mengenai kecocokan informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Secara sederhana, pengawasan meliputi tiga tahap utama: memantau (monitoring), mengevaluasi, dan melaporkan. Evaluasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas yang terkait dengan manajemen keuangan berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses tersebut (Koswara, Dkk 2015).

## SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN

Pengelola sekolah harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber pendanaan sekolah yang terbagi menjadi enam kategori: dana dari Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah), dana dari usaha mandiri sekolah, sumbangan dari orangtua peserta didik, dana dari dunia usaha dan industri, sumbangan dari masyarakat, dan dana dari yayasan. Semakin banyak sumber dana ini dimanfaatkan oleh sekolah, semakin menguntungkan bagi kelangsungan, pertumbuhan, dan perkembangan sekolah itu sendiri. Penjelasan rinci mengenai hal ini sebagai berikut (Mukminin 2011) :

### 1) Dana dari Pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah. Alokasinya biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas I, II, dan III. Setiap jenis pengeluaran dan jumlah dana untuk setiap pengeluaran telah ditentukan oleh Pemerintah dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana rutin (DIK) harus sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selain DIK, pemerintah juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara berkala, yang digunakan untuk membiayai semua kegiatan operasional sekolah. Dana dari Pemerintah (Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI) dan dari pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi) diberikan langsung ke lembaga-lembaga PAUD. Alokasi bantuan dari pemerintah ini belum merata dan masih terbatas, karena keterbatasan anggaran pemerintah dalam bidang pendidikan terutama PAUD. Jenis-jenis bantuan ini meliputi dana rintisan, penguatan, kelembagaan, pengadaan sarana dan prasarana, insentif tutor/pendidik, PAUD percontohan, dan dana kemitraan. Lembaga PAUD harus

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana tersebut.

2) Dana dari Orangtua Siswa

Pendanaan dari masyarakat ini dikenal dengan istilah iuran komite sekolah. Besarannya ditentukan dalam rapat komite sekolah dan merupakan sumbangan yang harus dibayar oleh orangtua siswa. Secara umum, iuran komite terdiri dari: (a) Dana tetap bulanan sebagai kontribusi wajib yang harus dibayar orangtua setiap bulan selama anak mereka bersekolah. (b) Dana incidental yang dibebankan kepada siswa baru, biasanya hanya sekali selama tiga tahun masa bersekolah (dapat dibayar secara angsuran). (c) Dana sukarela yang ditawarkan kepada orangtua siswa tertentu yang bersedia memberikan sumbangan secara sukarela tanpa adanya kewajiban.

3) Dana dari Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam pendanaan sekolah karena potensi mereka untuk memberikan sumbangan sukarela kepada sekolah. Contohnya, masyarakat sering mudah tergerak oleh tokoh-tokoh mereka, seperti ulama yang dihormati, yang bisa menggerakkan mereka untuk mendukung tugas-tugas sekolah. Jika pengelola sekolah mampu melibatkan tokoh-tokoh seperti ulama dalam mendukung sekolah, upaya penggalangan dana dari masyarakat akan menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk meningkatkan reputasi sekolah dalam mengelola dana bantuan, ada beberapa langkah yang perlu diambil pengelola sekolah.

Hal ini termasuk:

- a) Mengumpulkan testimoni dari peserta didik, guru, dan karyawan tentang manfaat bantuan yang diterima oleh sekolah.
- b) Memberikan pelayanan yang baik kepada para pendonor, seperti ucapan terima kasih, responsif terhadap pertanyaan, dan memberikan informasi terkini tentang kemajuan program sekolah.
- c) Meningkatkan eksposur sekolah melalui media sebanyak mungkin. Semakin sering sekolah diliput media, semakin besar potensi untuk mengumpulkan dana. Melalui media, informasi tentang kondisi sekolah dapat tersebar luas kepada masyarakat.
- d) Menyiapkan rekening khusus sebagai tempat untuk mengelola dana bantuan dalam bentuk uang.
- e) Mengajak tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi bagian dari komite sekolah, sehingga mereka dapat mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan lebih terstruktur (Barnawi dan Arifin, 2012:47). Dana ini umumnya berupa sumbangan sukarela yang diberikan oleh anggota masyarakat sekolah yang peduli terhadap kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Sumbangan sukarela ini merupakan ekspresi dari kepedulian mereka karena merasa terdorong untuk ikut serta dalam kemajuan pendidikan. Dana ini dapat diterima dari individu, organisasi, yayasan, maupun badan usaha baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.

4.) Dana dari Alumni

Bantuan yang diterima dari para alumni untuk meningkatkan mutu sekolah tidak selalu berupa uang, tetapi bisa berupa buku-buku, alat-alat, dan perlengkapan belajar lainnya. Dana yang dikumpulkan oleh sekolah dari para alumni merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari mereka yang merasa tergerak untuk mendukung kemajuan dan perkembangan sekolah. Dana ini bisa diterima langsung dari alumni atau dikumpulkan melalui acara reuni atau perayaan ulang tahun sekolah (lustrum)

5.) Dana dari Kegiatan Wirausaha Sekolah

Beberapa sekolah mengadakan kegiatan usaha untuk mengumpulkan dana. Dana ini berasal dari hasil berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang dikelola oleh staf

sekolah, seperti koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, layanan antar jemput siswa, panen hasil kebun sekolah, serta kegiatan seminar, pelatihan, atau lokakarya yang didanai oleh peserta yang menyisihkan sebagian dari biayanya untuk sekolah.

#### 6.) Pemanfaatan Sumber Dana Yayasan

Sekolah swasta umumnya berada di bawah naungan sebuah yayasan. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan terpisah dan digunakan untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tertentu, dan tidak memiliki anggota. Kekayaan yayasan berasal dari sumbangan sukarela, wakaf, hibah, wasiat, serta sumber lain yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Yayasan yang mengelola sekolah-sekolah memiliki kewajiban untuk mengurus dan memastikan bahwa kegiatan pendidikan di sekolah tersebut berjalan dengan baik (Barnawi dan Arifin, 2012:47).

### **Prinsip-prinsip dalam manajemen pembiayaan**

Manajemen keuangan bukan hanya tentang pencatatan transaksi akuntansi, tetapi merupakan bagian integral dari manajemen program yang tidak boleh dipisahkan sebagai aktivitas terpisah dari pekerjaan dalam bidang keuangan. Di organisasi non-pemerintah (NGO), manajemen keuangan mirip dengan merawat kendaraan. Jika kendaraan tersebut tidak mendapat bahan bakar, oli yang baik, dan perawatan teratur, maka kendaraan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal dan efisien. Bahkan, ada kemungkinan besar kendaraan tersebut akan rusak di tengah perjalanan dan gagal mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam praktiknya, manajemen keuangan adalah serangkaian tindakan untuk menjaga kesehatan keuangan organisasi. Oleh karena itu, untuk membangun sistem manajemen keuangan yang baik, penting untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip manajemen keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

Ada tujuh prinsip penting dalam manajemen keuangan yang harus diperhatikan:

1. **Konsistensi (Consistency):** Sistem dan kebijakan keuangan organisasi harus tetap konsisten dari waktu ke waktu. Meskipun fleksibilitas untuk penyesuaian diperlukan sesuai dengan perubahan dalam organisasi, pendekatan yang tidak konsisten dapat mengindikasikan adanya manipulasi dalam pengelolaan keuangan.
2. **Akuntabilitas (Accountability):** Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum bagi individu, kelompok, atau organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan oleh pihak ketiga. Organisasi NGO memiliki tanggung jawab operasional, moral, dan hukum untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. Semua pemangku kepentingan berhak untuk mengetahui bagaimana sumber daya organisasi digunakan.
3. **Transparansi (Transparency):** Organisasi harus bersikap terbuka mengenai pekerjaannya dengan menyediakan informasi terkait rencana dan aktivitasnya kepada pemangku kepentingan. Ini mencakup penyediaan laporan keuangan yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan serta penerima manfaat. Kurangnya transparansi dapat menunjukkan adanya sesuatu yang disembunyikan.
4. **Kelangsungan Hidup (Viability):** Untuk menjaga keuangan yang sehat, pengeluaran organisasi harus sejalan dengan dana yang diterima, baik di tingkat strategis maupun operasional. Kelangsungan hidup organisasi mengukur tingkat keamanan dan keberlanjutan keuangan, serta memerlukan manajer organisasi untuk merencanakan bagaimana organisasi dapat melaksanakan rencana strategisnya dan memenuhi kebutuhan keuangannya.
5. **Integritas (Integrity) :** Integritas diperlukan baik dari individu yang terlibat dalam kegiatan operasional maupun dalam laporan dan catatan keuangan. Ini mencakup kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan.
6. **Pengelolaan (Stewardship):** Organisasi harus dapat mengelola dana mereka dengan baik, memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan organisasi dan merencanakan pengendalian risiko keuangan yang sesuai.

7. Standar Akuntansi (Accounting Standards): Sistem akuntansi dan keuangan organisasi harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum, memastikan transparansi dan dipahami di seluruh dunia. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, organisasi dapat memastikan bahwa manajemen keuangan mereka tidak hanya efektif tetapi juga transparan, akuntabel, dan mendukung keberlanjutan serta integritas dalam semua aspek operasional.

### **Langkah-langkah manajerial pembiayaan**

Langkah-langkah manajerial dalam pembiayaan pendidikan meliputi beberapa aspek penting untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan operasional lembaga pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah tersebut secara umum:

1. **Perencanaan Keuangan:** Langkah awal yang penting adalah perencanaan keuangan yang komprehensif. Ini mencakup menyusun anggaran operasional, mengidentifikasi sumber daya keuangan yang tersedia (seperti dana dari pemerintah, donatur, atau biaya pendidikan dari siswa), serta menentukan kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang lembaga pendidikan.
2. **Pengumpulan Dana:** Manajerial pembiayaan pendidikan melibatkan upaya untuk mengumpulkan dana dari berbagai sumber. Ini bisa meliputi aplikasi untuk hibah atau bantuan dari lembaga pemerintah atau organisasi non-profit, kampanye penggalangan dana, sponsor atau donatur, serta pengelolaan pendapatan dari biaya pendidikan atau layanan tambahan.
3. **Pengelolaan Dana:** Setelah dana terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengelolaan dana dengan efisien. Ini mencakup pembuatan alokasi yang tepat untuk berbagai keperluan seperti gaji staf, pembelian peralatan dan perlengkapan pendidikan, pemeliharaan gedung, dan investasi untuk pengembangan pendidikan.
4. **Penyusunan Anggaran:** Manajerial pembiayaan pendidikan memerlukan penyusunan anggaran yang realistis dan terperinci. Anggaran ini harus mencakup semua biaya operasional dan kebutuhan pendidikan lainnya, serta memberikan ruang untuk kebutuhan mendesak atau biaya tak terduga.
5. **Pengendalian Biaya:** Penting untuk memonitor dan mengendalikan biaya operasional agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini termasuk memprioritaskan pengeluaran berdasarkan urgensi dan kebutuhan, serta melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan dana.
6. **Evaluasi dan Pelaporan:** Manajerial pembiayaan juga melibatkan evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan lembaga pendidikan. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana efisiensi dapat ditingkatkan atau di mana sumber daya keuangan lebih dapat dioptimalkan. Selain itu, pelaporan keuangan yang tepat waktu dan transparan kepada pihak-pihak terkait seperti dewan pengawas atau donatur juga merupakan bagian penting dari manajemen keuangan.
7. **Pengembangan Sumber Daya:** Langkah terakhir adalah mengembangkan sumber daya keuangan jangka panjang lembaga pendidikan. Ini bisa termasuk upaya untuk diversifikasi sumber pendanaan, penciptaan endowment fund, atau pengembangan program-program pendanaan jangka panjang lainnya untuk memastikan keberlanjutan keuangan.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, manajerial pembiayaan dalam pendidikan dapat membantu lembaga pendidikan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dari berbagai pihak terpenuhi dengan baik. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, seperti yang dikemukakan dalam Depdiknas (2000: 97-99):

- a. Anggaran harus digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Setiap kali ada penyimpangan anggaran, harus disertai dengan alasan yang jelas dan mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang sebelum dilaksanakan.
- b. Penggunaan anggaran harus dilakukan dengan se-efisien mungkin dan menghindari kecurigaan tentang peningkatan harga dalam pembelian atau pengadaan barang.
- c. Lembaga pendidikan harus menghindari kesan bahwa mereka hanya menghabiskan dana tanpa tujuan yang jelas.
- d. Pengeluaran anggaran hanya boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- e. Pemasukan dan pengeluaran uang harus tercatat secara tertib dan didukung dengan bukti-bukti tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Bukti pengeluaran tersebut harus siap untuk diperiksa kapan saja, sehingga siap dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang, dan harus dihindari transaksi tanpa pencatatan yang lengkap.
- g. Administrasi keuangan harus dilakukan secara terbuka sehingga semua pihak yang terkait dapat melihat laporan keuangan tersebut.

Dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan, bendaharawan di lembaga pendidikan diharapkan memperhatikan beberapa aspek, seperti hemat dan sesuai dengan kebutuhan, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selain itu, diperlukan penerapan panca tertib yaitu: (Sulistiyorini, 2009: 135).

- 1) Tertib program
- 2) Tertib anggaran
- 3) Tertib administrasi,
- 4) Tertib pelaksanaan, dan
- 5) Tertib pengendalian atau pengawasan

### **Akuntabilitas dan Transparansi dalam Manajemen Pembiayaan pada Lembaga PAUD**

Pada prinsip manajemen keuangan dan pembiayaan sendiri pada dasarnya yaitu mencakup akuntabilitas dan transparansi yang harus diterapkan untuk kesejahteraan guru dan kemajuan pada lembaga pendidikan. Penerapan kedua prinsip ini akan berdampak pada nilai positif bagi semua pihak di sekolah khususnya para guru. Sehingga pendapat yang muncul oleh pihak terkait kepada sekolah yaitu merupakan lembaga pendidikan yang jujur, adil, dan berwibawa. Akuntabilitas berarti penggunaan dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Transparansi memiliki arti adanya keterbukaan pada bidang manajemen yang berarti adanya keterbukaan dan kejujuran dalam mengelola kegiatan. Jika pengelolaan dalam keuangan kurang transparansi maka akan berakibat terjadinya berbagai hal negative yang tidak seharusnya ada. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap kesejahteraan guru (Maria Ulfah, 2019).

Transparansi pada keuangan sangat penting untuk meningkatkan semangat pada kerja guru dan orang tua. Manajemen keuangan yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan di antar guru satu dan yang lain. Selain itu, dapat saling berkolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan sekolah untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam konteks ini, transparansi berarti memberikan informasi terkait laporan keuangan secara jujur dan terbuka kepada pihak sekolah, baik itu guru maupun kepada Manajemen keuangan yang transparan juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana sesuai kebutuhan sekolah, yang melibatkan guru dan siswa. Transparansi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kriteria dalam laporan transparansi mencakup pertanggungjawaban yang jelas, bertanggung jawab terhadap pemasukan dan pengeluaran dana, serta membuat laporan pertanggungjawaban.

Transparansi dan akuntabilitas saling melengkapi dan memiliki peran penting dalam membentuk citra positif pada lembaga pendidikan. Keduanya menciptakan kepercayaan, kejujuran, dan kepuasan para pemangku kepentingan, serta membantu memastikan bahwa lembaga pendidikan berjalan dengan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Citra positif yang diciptakan dengan melakukannya

transparansi dan akuntabilitas sehingga akan meningkatkan reputasi lembaga pendidikan di mata masyarakat dan menjadi taktik kesuksesan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas (Sholeh, 2023)

### **SIMPULAN**

Manajemen keuangan yang terbuka akan meningkatkan kepercayaan di antar guru satu dan yang lain. Selain itu, dapat saling berkolaborasi dalam merumuskan langkah-langkah yang akan di lakukan sekolah untuk mencapai kemajuan yang signifikan. Dalam konteks ini, transparansi berarti memberikan informasi terkait laproan keuangan secara jujur dan terbuka kepada pihak sekolah, baik itu guru maupun kepada Manajemen keuangan yang transparan juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan dana sesuai kebutuhan sekolah, yang melibatkan guru dan siswa. Transparansi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Kriteria dalam laporan transparansi mencakup pertanggungjawaban yang jelas, bertanggung jawab terhadap pemasukan dan pengeluaran dana, serta membuat laporan pertanggungjawaban. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, manajerial pembiayaan dalam pendidikan dapat membantu lembaga pendidikan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan bahwa kebutuhan pendidikan dari berbagai pihak terpenuhi dengan baik. ). Manajemen pembiayaan memiliki peran yang sangat penting untuk ada di dalam penyelenggaraan pendidikan seperti PAUD, hal ini memiliki fungsi agar sistem keuangan pada lembaga pendidikan seperti PAUD lebih terstruktur dan terdata yang dapat dipertanggung jawabkan

### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhardi, M.Ag selaku Dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Manajemen PAUD yang telah membimbing kami serta memberikan banyak ilmu pada satu semester ini. Semoga segala ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan penuh keberkahan. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman satu tim penyusun jurnal ini yang telah bekerja sama dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakar, Abu, Taufani C. Kurniatun. 2015. Manajemen Pendidikan: Manajemen Keuangan Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Barnawi dan Mohammad Arifin. 2012. Buku Pintar Mengelola Sekolah Swasta. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Manajemen Keuangan. Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta: Dirjen Dikdasmen, Direktorat Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama.
- Horngren, P. 1993. Pengantar Akutansi Manajemen Edisi 6. Jakarta: Erlangga.
- Jahari, Jaja, dan Amirulloh Syarbini. 2013. Manajemen Madrasah: Teori, Strategi dan Implikasi. Bandung: Alfabeta.
- Koswara, D. Deni, dan Cepi Triatna. 2015. Manajemen Pendidikan: Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan.
- Machali, Imam, dan Ara Hidayat. 2018. The Hand Book of Education Management: Teori dan Praktek Pengelolaan Sekolah/Madrasah. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maria Ulfah. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Manajemen Keuangan dalam Mensejahterakan Guru dan Anak Didik di TK Alfadillah Maguwoharjo Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6804.
- Mukminin, Amirul. 2011. Bahan Ajar Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Diakses 25 Oktober 2017.
- Nazarudin, Nazarudin, Kris Setyaningsih, and Masayu Nadya Ardelya Kesumah. 2020. "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pada Pembiayaan Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Di Madrasah Aliyah Paradigma Palembang." *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10 (2): 131–46. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v10i2.993>.

- Nurdin, Diding, dan Imam Sibaweh. 2016. *Pengelolaan Pendidikan Dari Teori Menuju Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salamun, Suyono., F. X. I. (2013). *Manajemen Keuangan: Investasi dan Pembiayaan. Sabilarrasyad, III(02)*, 79.
- (Salamun, Suyono. 2013)Mahmudah, Siti, and Nono Hery Yoenanto. 2023. "Strategi Pendidikan Dasar Untuk Mencapai Akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan." *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan) 7 (2)*: 115–20. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v7n2.p115-120>.
- Sulistiyorini. 2009. *Manajemen Pendidikan Islam: Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Teras.
- Sholeh, M. I. (2023). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Membangun Citra Positif Melalui Manajemen Pendidikan Yang Berkualitas. Tadbiruna, 3(1)*, 43–55. <https://doi.org/10.51192/tadbiruna.v3i1.622>
- Wahyuni, A. (2023). *Analisis Manajemen Keuangan Lembaga Paud (Tk, Ra Dan Kb). Yaa Bunayya : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 7(2)*, 109. <https://doi.org/10.24853/yby.7.2.109-118>
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.